

DAMPAK PENYALAHGUNAAN WEWENANG HAK PEMEGANG SAHAM PERSERO DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS

by

Rizaldi Gustian¹, Paripurna P. Sugarda² and Nindyo Pramono³

UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 91 ayat (1) dan (2) dan PP No.12 Tahun 1998 pada pasal 10 dan 24 memberikan rambu-rambu yang tegas tentang tatacara pemberhentian Direksi/Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, yakni: “Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi/Komisaris sebelum habis masa jabatannya apabila anggota Direksi/Komisaris: (1) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; (2) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar; (3) melakukan tindakan yang merugikan PERSERO atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan PERSERO; atau (4) dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan pengurusan perusahaan. Akan tetapi, PP No.45 Tahun 2001 mengubah pasal 10 dan 24 tersebut menjadi; (1) RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi/Komisaris PERSERO sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya; (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi/Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Sejak adanya perubahan itu, hampir tidak pernah pemegang saham dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang saham BUMN (PERSERO) memperhatikan dan/atau menuruti aturan main tersebut dalam hal penggantian anggota Direksi/Komisaris. Artinya, telah terjadi penyalahgunaan wewenang hak pemegang saham, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap anggota Direksi/Komisaris yang diganti sebelum masa jabatannya berakhir. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah mantan anggota Direksi/Komisaris BUMN yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat disimpulkan sebagai berikut: menimbulkan ketidak pastian dalam bekerja (65%); hilangnya jiwa professional dan menimbulkan rasa patuh yang berlebihan terhadap keinginan pemegang saham (75%); merasa tidak adanya keadilan bagi yang diganti (80%); dan tidak diberi kesempatan membela diri dalam RUPS (70%).

Inilah yang menyebabkan pada dekade sekarang, manajemen BUMN lebih bertanggungjawab kepada pemegang saham, sehingga telah menyalahi jiwa dari UU No.1 Tahun 1995 di mana manajemen harus bertanggung jawab kepada PERSERO.

MISCONDUCTED SHAREHOLDER'S AUTHORITY IN TERMINATING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

By: 1) Rizaldi Gustian, 2) Paripurna P Sugarda, and 3) Nindyo Pramono.

Abstract

The Law No. 1/1995 regarding Limited Company, article 91, paragraph 1) and 2), and Government Regulation (GR) No 12/1998, article 10 and 24 regarding The procedure of terminating The Board of Commissioner (BOD) and the Board of Directors (COD) says that, “ The Shareholders General Meeting (SGM) may terminate member of COD/BOD before He or She has not finished out his or her duty if and only if 1) He/She is not performed well. 2) He/She is not following the rule of law and or the company's law. 3) To do some unprofitable business actions that affect to the company lose 4) Being criminals and prisoners which affiliated to the company business. In spite the fact, GR No. 45/2001 changed the article 10 and 24 becomes as followed 1) SGM may terminate BOD/COD at anytime before his/her duty finished without saying the reasons; 2) Decision to make the termination is taken after the BOD/COD is request to explain the appeal.

Since the change of the rules, some misconduct the shareholder authority were happened then followed by a number of BOD or COD changed. The affect to world of existing BOD/COD indicates as followed; 1) Insecurity fillings may happened at works because the BOD/COD can be changed easily (65%). 2) Lose of the professionalisms and obedience too much follows the shareholder's need (75%). 3) Injustices filling to those who succeeded then he/she become passive (80%) and effect to the psychology impact to the family and his/her self (85%) and there is an intention to sue the shareholder but no enough fund to do so (75%). 4) The management right to appeal is not being given in SGM (70%).

The solution of above problem is directed to the BOD/COD works for the company importance instead of the shareholders one is that; 1) Back to GR 12/1998. 2) BOD/COD do the works protected by contracts in order to improve their performance professionally. 3) In order to recovery the injustice filling, the company should be returned to chapter 69 paragraph 1 to 4, the Law No 1/1995. 4) The right to appeal of BOD/COD should follow the chapter 91 paragraph 2 and chapter 95 paragraph 5, and the appeal should be justified by an independent team.

Keywords : Misconduct shareholder's authority within Shareholder General Meeting as the Government Regulation misleading implication.